

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai lingkup tugasnya, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk terwujudnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terarah, sistematis dan pencapaian kinerja yang optimal maka Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan merumuskan langkah-langkah strategis yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tiap tahunnya. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut disusun dalam bentuk dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Pada prinsipnya, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra), dimana di dalamnya mencakup visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini dilakukan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah memiliki kesesuaian, tidak menyimpang dan dapat berjalan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2022 yang telah ditetapkan sehingga tujuan, sasaran dan target pembangunan dapat direalisasikan secara optimal.



## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Kedua;
- f. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. 6/2021 Tanggal 22 September 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- s. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 tanggal 22 Mei 2019;
- t. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018 ;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah menyediakan tolok ukur pelaksanaan pembangunan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode satu tahun, yaitu tahun 2022, yang membuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah:

1. Menjabarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dan Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023 ke dalam rencana pembangunan tahunan.
2. Menyediakan pedoman penyusunan kebijakan umum anggaran dan penetapan plafon anggaran program dan kegiatan tahun 2022.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penyajian Laporan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

##### Bab. I Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

##### Bab. II Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.

Berisikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BPKAD Tahun 2021 dan capaian Renstra, Analisis kinerja pelayanan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, reviu terhadap rancangan awal RKPD.

##### Bab. III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

Menjelaskan telaahan terhadap kebijakan nasional dan prioritas pembangunan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

#### Bab. IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisikan rencana kerja dan pendanaan, program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### Bab. V Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 dan Capaian Renstra BPKAD Provinsi Sumatera Selatan

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan pemerintahan pada urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang didalamnya terdapat bidang Sekretariat, Perencanaan Anggaran Daerah, Perbendaharaan Daerah, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, dan Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Setiap program selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan yang mendukung. Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka menunaikan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai satuan kerja perangkat daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, setiap program dan kegiatan dibebani suatu indikator kinerja. Program dibebani indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) sedangkan kegiatan dibebani indikator kinerja yang bersifat keluaran (*output*). Target capaian kinerja ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) untuk lima tahun dan dijabarkan dalam target kinerja tahunan dalam Rencana Kerja (Renja).

Hasil pengukuran capaian kinerja tiap tahun atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Tabel T-C.29 berikut menyajikan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021.



**Tabel T-C.29**

**REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN PENCAPAIAN RENSTRA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH S/D TAHUN 2021**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (AKHIR RENSTRA OPD) TAHUN 2021	REALISASI KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN LALU(n-2)			TARGET REALISASI PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022 (n-1)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
						TARGET RENJA OPD TAHUN 2021 (n-2)	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2021 (n-2)	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
<b>5.02.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>								
<b>5.02.01.1.01</b>	<b>i</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>				100%				100%
5.02.01.1.01.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, Revisi Renstra yang disusun	2 Buku	2 Buku	2 Buku	2 Buku		2 Buku	2 Buku	
5.02.01.1.01.02	2	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Penyusunan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	

		Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD								
5.02.01.1.01.03	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	
5.02.01.1.01.04	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	
5.02.01.1.01.05	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	
5.02.01.1.01.06	6	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	
5.02.01.1.01.07	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip yang disusun	1 buku	1 buku	1 buku	1 buku		1 buku	1 buku	
<b>5.02.01.1.02</b>	<b>ii</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>					100%			100%
5.02.01.1.02.01	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	93 ASN	93 ASN	93 ASN	93 ASN		93 ASN	93 ASN	
5.02.01.1.02.02	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun		1 tahun	1 tahun	
5.02.01.1.02.03	10	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Tanggapan Pemeriksa dan verifikasi hibah	10 laporan dan 17 Kab/Kota	10 laporan dan 17 Kab/Kota	10 laporan dan 17 Kab/Kota	10 laporan dan 17 Kab/Kota		10 laporan dan 17 Kab/Kota	10 laporan dan 17 Kab/Kota	

5.02.01.1.02.04	11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	
5.02.01.1.02.05	12	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
5.02.01.1.02.06	13	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan	2 orang bendahara, 2 orang PPK, dan 2 orang verifikator	2 orang bendahara, 2 orang PPK, dan 2 orang verifikator	2 orang bendahara, 2 orang PPK, dan 2 orang verifikator	2 orang bendahara, 2 orang PPK, dan 2 orang verifikator		2 orang bendahara, 2 orang PPK, dan 2 orang verifikator	2 orang bendahara, 2 orang PPK, dan 2 orang verifikator	
<b>5.02.01.1.03</b>	<b>iii</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>					100%			100%
5.02.01.1.03.01	14	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	
5.02.01.1.03.02	15	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan dan deposit box yang dijamin	15 Save Deposit Box, 20 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 20 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 20 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 20 Unit R4, 20 Unit R2		15 Save Deposit Box, 20 Unit R4, 20 Unit R2	15 Save Deposit Box, 20 Unit R4, 20 Unit R2	
5.02.01.1.03.04	16	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan dan hasil penerimaan daerah dari TP-TGR	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	

<b>5.02.01.1.05</b>	<b>iv</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Adminstrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>					100%			100%
5.02.01.1.05.02	17	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	400 orang/stel 1	400 orang/stel	400 orang/stel	400 orang/stel		400 orang/stel	400 orang/stel	
5.02.01.1.05.03	18	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat	7 orang	7 orang	7 orang	7 orang		7 orang	7 orang	
5.02.01.1.05.05	19	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pembinaan SAKIP	-	-	-	-		-	-	
5.02.01.1.05.09	20	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang dihimpun analisa jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>v</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>								
5.02.01.1.06.01	21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32 jenis	32 jenis	32 jenis	32 jenis		32 jenis	32 jenis	
5.02.01.1.06.02	22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas		Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	

5.02.01.1.06.03	23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	10 jenis peralatan rt, 18 jenis perlengkapan rt	10 jenis peralatan rt, 18 jenis perlengkapan rt	10 jenis peralatan rt, 18 jenis perlengkapan rt	10 jenis peralatan rt, 18 jenis perlengkapan rt		10 jenis peralatan rt, 18 jenis perlengkapan rt	10 jenis peralatan rt, 18 jenis perlengkapan rt	
5.02.01.1.06.04	24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Penyediaan Makan Minum	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih		10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	
5.02.01.1.06.05	25	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang cetak dan Penggandaan	40 jenis yang dicetak, 45,000 counter	40 jenis yang dicetak, 45,000 counter	40 jenis yang dicetak, 45,000 counter	40 jenis yang dicetak, 45,000 counter		40 jenis yang dicetak, 45,000 counter	40 jenis yang dicetak, 45,000 counter	
5.02.01.1.06.06	26	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	7 surat kabar	7 surat kabar	7 surat kabar	7 surat kabar		7 surat kabar	7 surat kabar	
5.02.01.1.06.07	27	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor	10 Jenis ATK	10 Jenis ATK	10 Jenis ATK	10 Jenis ATK		10 Jenis ATK	10 Jenis ATK	
5.02.01.1.06.08	28	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Laporan Koordinasi dan Konsultasi	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah		150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	
5.02.01.1.06.09	29	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang terpelihara	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi	7 Aplikasi		7 Aplikasi	7 Aplikasi	

5.02.01.1.06.10	30	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Keterbukaan Informasi Publik	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel		Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>vi</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					100%			100%
5.02.01.1.07.05	31	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeleur yang tersedia	Meja, kursi dan lemari	Meja, kursi dan lemari	Meja, kursi dan lemari	Meja, kursi dan lemari		Meja, kursi dan lemari	Meja, kursi dan lemari	
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>vi i</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>					100%			100%
5.02.01.1.08.01	32	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	1000 Surat	1000 Surat	1000 Surat	1000 Surat		1000 Surat	1000 Surat	
5.02.01.1.08.02	33	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	4 rek listrik, 24 rek telepon, 3 rek air dan 5 rek internet	4 rek listrik, 24 rek telepon, 3 rek air dan 5 rek internet	4 rek listrik, 24 rek telepon, 3 rek air dan 5 rek internet	4 rek listrik, 24 rek telepon, 3 rek air dan 5 rek internet		4 rek listrik, 24 rek telepon, 3 rek air dan 5 rek internet	4 rek listrik, 24 rek telepon, 3 rek air dan 5 rek internet	
<b>5.02.01.1.09</b>	<b>vi ii</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>					100%			100%

5.02.01.1.09.01	34	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi	20 R4 & 20 R2	20 R4 & 20 R2	20 R4 & 20 R2	20 R4 & 20 R2		20 R4 & 20 R2	20 R4 & 20 R2	
5.02.01.1.09.02	35	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	20 R4 & 20 R2	20 R4 & 20 R2	20 R4 & 20 R2	20 R4 & 20 R2		20 R4 & 20 R2	20 R4 & 20 R2	
5.02.01.1.09.06	36	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor	10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor	10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor	10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor		10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor	10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor	
5.02.01.1.09.07	37	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	1 unit gedung kantor dan 1 gudang arsip	1 unit gedung kantor dan 1 gudang arsip	1 unit gedung kantor dan 1 gudang arsip	1 unit gedung kantor dan 1 gudang arsip		1 unit gedung kantor dan 1 gudang arsip	1 unit gedung kantor dan 1 gudang arsip	
<b>5.02.02</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>	<b>APBD yang Tepat Waktu</b>								
<b>5.02.02.1.01</b>	<b>i</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>					100%			100%
5.02.02.1.01.01	38	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	

5.02.02.1.01.02	39	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	
5.02.02.1.01.07	40	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA		100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	
5.02.02.1.01.08	41	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran Perubahan APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA		100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	
5.02.02.1.01.09	42	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG)	-	-	-	-		-	-	
5.02.02.1.01.10	43	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perda yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	



<b>5.02.02.1.02</b>	<b>ii</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>					100%			100%
5.02.02.1.02.02	44	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang terlaksana	2 Buku (Buku Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota dan Buku Penyempurnaan Evaluasi APBD Kab/Kota)	2 Buku (Buku Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota dan Buku Penyempurnaan Evaluasi APBD Kab/Kota)	2 Buku (Buku Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota dan Buku Penyempurnaan Evaluasi APBD Kab/Kota)	2 Buku (Buku Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota dan Buku Penyempurnaan Evaluasi APBD Kab/Kota)		2 Buku (Buku Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota dan Buku Penyempurnaan Evaluasi APBD Kab/Kota)	2 Buku (Buku Hasil Evaluasi APBD Kab/Kota dan Buku Penyempurnaan Evaluasi APBD Kab/Kota)	
5.02.02.1.02.03	45	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang terlaksana	17 SK	17 SK	17 SK	17 SK		17 SK	17 SK	
5.02.02.1.02.04	46	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	

5.02.02.1.02.05	47	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pemahaman Peraturan tentang BLUD	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5.02.02.1.03</b>	<b>iii</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>					100%			100%
5.02.02.1.03.01	48	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi pengelolaan kas daerah	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	
5.02.02.1.03.04	49	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi DAK Fisik dan Non Fisik	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer		3 Laporan/ Jenis Dana Transfer	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer	
5.02.02.1.03.05	50	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD		41 OPD	41 OPD	
5.02.02.1.03.06	51	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah kewajiban biaya pengelolaan dan biaya provisi	SMI	SMI	SMI	SMI		SMI	SMI	
<b>5.02.02.1.04</b>	<b>iv</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>					100%			100%

5.02.02.1.04.02	52	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Laporan rekonsiliasi	Berita Acara Rekon Pendapatan Daerah	Berita Acara Rekon Pendapatan Daerah	Berita Acara Rekon Pendapatan Daerah	Berita Acara Rekon Pendapatan Daerah		Berita Acara Rekon Pendapatan Daerah	Berita Acara Rekon Pendapatan Daerah	
5.02.02.1.04.04	53	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi		1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	
5.02.02.1.04.05	54	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi		1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	
<b>5.02.02.1.05</b>	<b>v</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>					100%			100%
5.02.02.1.05.01	55	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Kewajiban cicilan bunga pinjaman	SMI	SMI	SMI	SMI		SMI	SMI	

5.02.02.1.05.02	56	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota		17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	
5.02.02.1.05.03	57	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota		17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	
5.02.02.1.05.04	58	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi yang dikelola	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	17 Kab/Kota		17 Kab/Kota	17 Kab/Kota	
<b>5.02.03</b>		<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>								
<b>5.02.03.1.01</b>	<b>i</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>					100%			100%
5.02.03.1.01.01	59	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	
5.02.03.1.01.03	60	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan	41 Laporan		41 Laporan	41 Laporan	
5.02.03.1.01.05	61	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah	20 SK Gubernur Penetapan Status, 10 Berita Acara Mutasi, 5 SK Penghapusan Aset	20 SK Gubernur Penetapan Status, 10 Berita Acara Mutasi, 5 SK Penghapusan Aset	20 SK Gubernur Penetapan Status, 10 Berita Acara Mutasi, 5 SK Penghapusan Aset	20 SK Gubernur Penetapan Status, 10 Berita Acara Mutasi, 5 SK Penghapusan Aset		20 SK Gubernur Penetapan Status, 10 Berita Acara Mutasi, 5 SK Penghapusan Aset	20 SK Gubernur Penetapan Status, 10 Berita Acara Mutasi, 5 SK Penghapusan Aset	
5.02.03.1.01.07	62	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	41 OPD	41 OPD	41 OPD	41 OPD		41 OPD	41 OPD	

5.02.03.1.01.08	63	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang terinventarisasi	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD		Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	
5.02.03.1.01.09	64	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama	4 SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama	4 SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama	4 SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama	4 SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama		4 SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama	4 SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama	
5.02.03.1.01.10	65	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD tahunan dan semesteran	1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran	1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran	1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran	1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran		1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran	1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran	
5.02.03.1.01.11	66	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	

## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dicapai dengan melaksanakan seluruh program yang diamanatkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan termasuk dalam amanat tersebut adalah melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai bidang urusan yang dilimpahkan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Indikator kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan terletak pada sasaran pembangunan dalam Renstra. Indikator kinerja pelayanan merupakan indikator kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) dan menggambarkan indikator kinerja program-program yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran pembangunan dimaksud.

Analisis pencapaian kinerja pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada Tabel T-C.30, termasuk dalam analisis tersebut adalah proyeksi kinerja pelayanan tahun rencana dan satu tahun maju.

**TABEL T-C.30**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Indikator	SPM/ Stand ar Nasio nal	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
				(th. n-2)	(th. n-1)	(th. n1)	(th. n+1)	(th. n-2)	(th. n-1)	(th. n1)	(th. n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Penetapan perda dan pergub APBD yang tepat waktu			Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	LK-SKPD TA 2021 baru akan disampaikan ke BPKAD Prov. Sumsel pada bidang akuntansi dan pelaporan tanggal 1 Febuari 2022, kemudian disampaikan ke BPK 30 Maret 2022
2	Persentase dokumen SPJ yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3	Persentase kesesuaian antara aset lancar dan aset tetap dengan catatan atas laporan keuangan dan bukti dokumen			WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	LK-SKPD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan SKPD yang dikirim ke BPKAD Prov. Sumsel melalui bidang akuntansi dan pelaporan
4	Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Untuk mengetahui kondisi aset, maka setelah data aset diinput dalam SIMDA BMD, kemudian akan dilakukan cek fisik terhadap aset tersebut.
5	Persentase tertibnya dokumen perencanaan, pelaporan, data informasi, administrasi umum,					100%	100%			100%	100%	



	kepegawaian, keuangan dan aset yang tepat waktu											
6	Persentase APBD/P Kab/Kota yang tepat waktu dan benar			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
7	Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dalam upaya untuk mencapai target diatas, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah telah menentukan strategi dan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan selama periode rentang waktu 2019-2023. Berdasarkan hasil yang telah dicapai selama rentang waktu tersebut menunjukkan bahwa Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal. Pada tahun 2020, Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berhasil mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) yang ke-7 (tujuh) kali. Opini ini menunjukkan bahwa BPKAD Provinsi Sumatera Selatan bersama OPD terkait selalu berusaha untuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK yang menjadi penghambat untuk mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) tersebut.

Untuk mengatasi kendala perhitungan aset daerah, BPKAD Provinsi Sumatera Selatan melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengaplikasikan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) BMD versi terbaru (2.0.7.11) bersama OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan agar bisa menghitung penyusutan aset untuk menunjang kebijakan Akrual Basis.
2. Melakukan perbaikan kepemilikan dan perpanjangan sertifikat untuk yang masanya sudah habis.
3. Menginventarisasikan aset-aset daerah yang tersebar di Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Mencocokkan data yang ada di OPD dengan SIMDA BMD (verifikasi aset).

Untuk menunjang Aplikasi SIPD Keuangan dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan Bimbingan Teknik (BimTek) SIPD.
2. Menerapkan data terupdate Aplikasi SIPD dari Kementerian Dalam Negeri.

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsinya Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dihadapkan pada beberapa permasalahan, terutama permasalahan terkait pelayanan dalam mencapai target kinerja sebagaimana disajikan pada Tabel T-C.30, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Adanya aset yang tidak terpakai tidak dilaporkan oleh OPD.
2. Pemakaian rumah dinas belum tertib peruntukannya.
3. Masih kurangnya kepedulian OPD dalam pengelolaan aset daerah.
4. Masih banyak tanah yang belum besertifikat, lokasi aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagian tersebar diwilayah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan dan masih terdapat aset tanah yang status kepemilikannya tumpang tindih dengan pihak lain.
5. Masih ada beberapa OPD yang melakukan rehab gedung dan bangunan tetapi belum melakukan penghapusan aset, sehingga nilai penyusutan aset tidak bisa dicatat.
6. Aplikasi koordinator pendapatan tidak ada interkoneksi dengan aplikasi keuangan, belum ada produk hukum yang mengatur masalah retribusi, hal ini menyebabkan penatausahaan pendapatan di koordinator pendapatan (Bapenda) belum valid.
7. Masih rendahnya realisasi pencapaian setoran TP/TGR.

Permasalahan-permasalahan diatas akan segera ditindak lanjuti pada program dan kegiatan yang ada di Tahun Anggaran 2022 agar visi dan misi Gubernur Sumatera Selatan serta capaian program nasional di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dapat terwujud. Hal ini terkait dengan capaian indikator kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD yang pelaksanaannya adalah oleh OPD-OPD sesuai pelimpahan kewenangan yang diberikan.

Tantangan (*treaths*) yang dihadapi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam pengembangan pelayanan tahun 2021, antara lain sebagai berikut :

1. Mengimplementasikan Aplikasi Pemerintah yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri yaitu penyusunan anggaran tahun 2021, selain itu SIPD juga disandingkan dengan Sistem Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) Keuangan versi terbaru (2.9.0.9) untuk proses penatausahaan dan pertanggungjawaban.
2. Penerapan anggaran berbasis kinerja untuk mencapai efisiensi penggunaan anggaran.
3. Mendata seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Melakukan inventarisasi seluruh aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
5. Optimalisasi pemanfaatan aset, sehingga bisa menambah PAD Provinsi Sumatera Selatan.

Peluang-peluang (*opportunities*) pengembangan pelayanan tahun 2022 di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, antara lain sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.77/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Perkembangan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
3. Terdapat sumber-sumber pendanaan lain diluar APBD provinsi (pihak swasta) yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan daerah kearah yang lebih baik sesuai visi dan misi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023.
4. Adanya kebijakan Pemerintah Daerah tentang peluang investasi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan
5. Adanya peluang investasi dari pihak asing di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai uraian singkat tersebut di atas, isu penting yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2022 adalah :

1. Bagaimana mensosialisasikan segera peraturan baru dibidang keuangan dan aset daerah.
2. Bagaimana mengembangkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang berbasis teknologi informasi.
3. Bagaimana meningkatkan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota secara periodik.
4. Bagaimana meningkatkan kualitas SDM.
5. Bagaimana meningkatkan optimalisasi pemanfaatan aset, sehingga bisa meningkatkan PAD.
6. Bagaimana mengembangkan SIMDA Barang Milik Daerah agar dapat mengoptimalkan inventarisasi barang.

#### 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Penyusunan rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Telaahan terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan

dengan arahan Gubernur Sumatera Selatan terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Tabel T-C.31 berikut memberikan gambaran identifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD dibandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis tahap-tahap sebelumnya.

**Tabel T-C.31**  
**Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>		<b>105.955.330.152</b>	I	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>		<b>Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>		<b>105.955.330.152</b>	
i	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>1.423.000.000</b>	i	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>1.423.000.000</b>	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Renja, Revisi Renstra yang disusun	2 Buku	115.000.000	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Renja, Revisi Renstra yang disusun	2 Buku	115.000.000	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	122.500.000	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	122.500.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	112.500.000	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	112.500.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	109.000.000	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	109.000.000	

	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	98.000.000		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	98.000.000	
	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Lakip yang disusun	1 buku	486.000.000		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Lakip yang disusun	1 buku	486.000.000	
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	8 laporan	380.000.000		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	8 laporan	380.000.000	
	ii	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>83.449.225.152</b>		ii	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>83.449.225.152</b>	
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	110 ASN	78.245.835.152		8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	110 ASN	78.245.835.152	
	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	5 ASN dan 85 Non ASN	3.325.990.000		9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	5 ASN dan 85 Non ASN	3.325.990.000	
	10	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	Jumlah jasa administrasi keuangan	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikator	801.400.000		10	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	Jumlah jasa administrasi keuangan	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikator	801.400.000	
	11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palembang	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terkoordinasi	10 Dokumen	135.000.000		11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palembang	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terkoordinasi	10 Dokumen	135.000.000	



	1 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terkoordinasi	1 Dokumen	135.000.000		1 2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terkoordinasi	1 Dokumen	135.000.000	
	1 3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Palembang dan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Tanggapan Pemeriksa dan verifikasi hibah	10 Laporan dan 17 Kab/Kota	586.000.000		1 3	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Palembang dan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Tanggapan Pemeriksa dan verifikasi hibah	10 Laporan dan 17 Kab/Kota	586.000.000	
	1 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	140.000.000		1 4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	140.000.000	
	1 5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Palembang	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	80.000.000		1 5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Palembang	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	80.000.000	
	iii	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>705.000.000</b>		iii	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>705.000.000</b>	
	1 6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Palembang	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Laporan	80.000.000		1 6	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Palembang	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Laporan	80.000.000	
	1 7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palembang	Jumlah kendaraan dan deposit box yang dijamin	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	215.000.000		1 7	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palembang	Jumlah kendaraan dan deposit box yang dijamin	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	215.000.000	

	18	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah laporan dan hasil penerimaan daerah dari TP-TGR	1 Laporan	250.000.000		18	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah laporan dan hasil penerimaan daerah dari TP-TGR	1 Laporan	250.000.000	
	19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Rekonsiliasi dan Laporan BMD pada SKPD yang disusun	1 Laporan	80.000.000		19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Rekonsiliasi dan Laporan BMD pada SKPD yang disusun	1 Laporan	80.000.000	
	20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	21 Unit Kendaraan Dinas	80.000.000		20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	21 Unit Kendaraan Dinas	80.000.000	
	<b>iv</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>1.367.250.000</b>		<b>iv</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Admistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>1.367.250.000</b>	
	21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palembang	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	600 orang/stel	800.000.000		21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palembang	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	600 orang/stel	800.000.000	
	22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palembang	Jumlah ASN yang dihimpun analisa jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	1 Laporan	312.250.000		22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palembang	Jumlah ASN yang dihimpun analisa jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	1 Laporan	312.250.000	
	23	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Palembang	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (PK)	110 ASN	55.000.000		23	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Palembang	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (PK)	110 ASN	55.000.000	
	24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Palembang dan Luar Provinsi	Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat	15 orang	200.000.000		24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Palembang dan Luar Provinsi	Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat	15 orang	200.000.000	

	v	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		8.404.535.000		v	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah		8.404.535.000	
	25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32 jenis	420.000.000		25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32 jenis	420.000.000	
	26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	823.772.500		26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	823.772.500	
	27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Palembang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	10 jenis peralatan rumah tangga, 18 jenis perlengkapan rumah tangga	201.450.000		27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Palembang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	10 jenis peralatan rumah tangga, 18 jenis perlengkapan rumah tangga	201.450.000	
	28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palembang	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Penyediaan Makan Minum	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	384.874.500		28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palembang	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Penyediaan Makan Minum	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	384.874.500	
	29	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palembang	Jumlah Kebutuhan Barang cetakan dan Penggandaan	40 jenis yang dicetak, 45.000 counter	1.113.000.000		29	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palembang	Jumlah Kebutuhan Barang cetakan dan Penggandaan	40 jenis yang dicetak, 45.000 counter	1.113.000.000	

	30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palembang	Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	7 surat kabar	52.500.000		30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palembang	Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	7 surat kabar	52.500.000	
	31	Penyediaan Bahan/Material	Palembang	Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor	10 jenis ATK	1.619.538.000		31	Penyediaan Bahan/Material	Palembang	Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor	10 jenis ATK	1.619.538.000	
	32	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu di ruang konsultasi	10.000 tamu	200.000.000		32	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu di ruang konsultasi	10.000 tamu	200.000.000	
	33	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	Jumlah Kebutuhan Laporan Koordinasi dan Konsultasi	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	1.450.000.000		33	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	Jumlah Kebutuhan Laporan Koordinasi dan Konsultasi	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	1.450.000.000	
	34	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	Jumlah Keterbukaan Informasi Publik	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	916.400.000		34	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	Jumlah Keterbukaan Informasi Publik	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	916.400.000	
	35	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palembang	Jumlah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang terpelihara	7 Aplikasi	1.223.000.000		35	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palembang	Jumlah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang terpelihara	7 Aplikasi	1.223.000.000	
	vi	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>400.000.000</b>		vi	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>400.000.000</b>	
	36	Pengadaan Mebel	Palembang	Jumlah Meubeleur yang tersedia	Meja, kursi dan lemari	400.000.000		36	Pengadaan Mebel	Palembang	Jumlah Meubeleur yang tersedia	Meja, kursi dan lemari	400.000.000	

	<b>vi i</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1.706.250.000</b>		<b>vi i</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1.706.250.000</b>	
	37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah surat menyurat yang dikirim	1000 surat	26.250.000		37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah surat menyurat yang dikirim	1000 surat	26.250.000	
	38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	Jumlah tagihan komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	4 rekening listrik, 24 rekening telepon, 3 rekening air, 5 rekening internet	1.680.000.000		38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	Jumlah tagihan komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	4 rekening listrik, 24 rekening telepon, 3 rekening air, 5 rekening internet	1.680.000.000	
	<b>vi ii</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>		<b>8.500.070.000</b>		<b>vi ii</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>		<b>8.500.070.000</b>	
	39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palembang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi	21 R4, 20 R2	840.000.000		39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palembang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi	21 R4, 20 R2	840.000.000	

	40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	21 R4, 20 R2	299.250.000		40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	21 R4, 20 R2	299.250.000	
	41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palembang	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor	955.000.000		41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palembang	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor	955.000.000	
	42	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Palembang	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin, venue, dan lahan/area di JSC yang terpelihara	Venue, lahan/area JSC	5.000.000.000		42	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Palembang	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin, venue, dan lahan/area di JSC yang terpelihara	Venue, lahan/area JSC	5.000.000.000	
	43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	1 unit gedung kantor, 2 gudang arsip	1.405.820.000		43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	1 unit gedung kantor, 2 gudang arsip	1.405.820.000	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			<b>APBD yang Tepat Waktu</b>		<b>3.341.161.189.962</b>		<b>I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			<b>APBD yang Tepat Waktu</b>		<b>3.341.161.189.962</b>
	<b>i</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>4.190.000.000</b>		<b>i</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>4.190.000.000</b>	
	44	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS	2 dokumen	360.000.000		44	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS	2 dokumen	360.000.000	

	4 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	360.000.000		4 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	360.000.000	
	4 6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Palembang	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	1.280.000.000		4 6	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Palembang	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	1.280.000.000	
	4 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Palembang	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran Perubahan APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	1.280.000.000		4 7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Palembang	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran Perubahan APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	1.280.000.000	
	4 8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Palembang	Jumlah Perda yang dihasilkan	1 Dokumen	910.000.000		4 8	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Palembang	Jumlah Perda yang dihasilkan	1 Dokumen	910.000.000	
	ii	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1.290.000.000</b>		ii	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>1.290.000.000</b>	

	49	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang terlaksana	17 SK	495.000.000		49	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang terlaksana	17 SK	495.000.000	
	50	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang terlaksana	17 SK	495.000.000		50	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang terlaksana	17 SK	495.000.000	
	51	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	300.000.000		51	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	300.000.000	
	iii	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>5.912.187.700</b>		iii	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>5.912.187.700</b>	



	5 2	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Palembang	Jumlah laporan rekonsiliasi pengelolaan kas daerah	12 Laporan	545.000.000		5 2	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Palembang	Jumlah laporan rekonsiliasi pengelolaan kas daerah	12 Laporan	545.000.000	
	5 3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Palembang	Jumlah kewajiban biaya pengelolaan dan biaya provisi	SMI	4.326.187.700		5 3	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Palembang	Jumlah kewajiban biaya pengelolaan dan biaya provisi	SMI	4.326.187.700	
	5 4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Palembang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi DAK Fisik dan Non Fisik	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer	416.000.000		5 4	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Palembang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi DAK Fisik dan Non Fisik	3 Laporan/ Jenis Dana Transfer	416.000.000	
	5 5	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Palembang	Jumlah laporan pelaksanaan transaksi non tunai	1 Laporan	275.000.000		5 5	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Palembang	Jumlah laporan pelaksanaan transaksi non tunai	1 Laporan	275.000.000	
	5 6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Palembang	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	41 OPD	350.000.000		5 6	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Palembang	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	41 OPD	350.000.000	
	iv	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>1.479.330.000</b>		iv	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>1.479.330.000</b>	

	57	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Palembang	Jumlah Laporan rekonsiliasi	2 Buku	446.200.000		57	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Palembang	Jumlah Laporan rekonsiliasi	2 Buku	446.200.000	
	58	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	503.600.000		58	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	503.600.000	
	59	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Palembang	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban	529.530.000		59	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Palembang	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban	529.530.000	
	v	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>3.328.289.672.262</b>		v	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>3.328.289.672.262</b>	
	60	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Palembang	Jumlah Kewajiban cicilan bunga pinjaman	SMI	16.500.000.000		60	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Palembang	Jumlah Kewajiban cicilan bunga pinjaman	SMI	16.500.000.000	

	6 1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab/Kota	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	1.518.139.672.26 2		6 1	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab/Kota	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	1.518.139.672.262	
	6 2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab/Kota	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola	17 Kab/Kota	16.000.000.000		6 2	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab/Kota	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola	17 Kab/Kota	16.000.000.000	
	6 3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi yang dikelola	17 Kab/Kota	1.777.650.000.00 0		6 3	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi yang dikelola	17 Kab/Kota	1.777.650.000.000	
<b>II I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>			<b>Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>10.407.600.180</b>		<b>I I I</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>			<b>Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>10.407.600.180</b>
	<b>i</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>10.407.600.180</b>		<b>i</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>10.407.600.180</b>	
	6 4	Penyusunan Standar Harga	Palembang	Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun	1 Dokumen	649.250.000		6 4	Penyusunan Standar Harga	Palembang	Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun	1 Dokumen	649.250.000	
	6 5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	41 Laporan	95.000.000		6 5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	41 Laporan	95.000.000	
	6 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah	20 SK Gubernur Penetapan Status, 10 Berita Acara Mutasi, 5 SK Penghapusan Aset	580.000.000		6 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah	20 SK Gubernur Penetapan Status, 10 Berita Acara Mutasi, 5 SK Penghapusan Aset	580.000.000	

	67	Pengamanan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah BMD yang diamankan	41 OPD	3.825.000.000		67	Pengamanan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah BMD yang diamankan	41 OPD	3.825.000.000		
	68	Penilaian Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	20 Laporan Penilaian BMD	360.000.000		68	Penilaian Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	20 Laporan Penilaian BMD	360.000.000		
	69	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Palembang	Persentase aset yang terinventarisasi	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	2.801.710.180		69	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Palembang	Persentase aset yang terinventarisasi	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	2.801.710.180		
	70	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama	8 SK MOU (kerjasama), 1 Laporan BMD Semesteran	1.476.640.000		70	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama	8 SK MOU (kerjasama), 1 Laporan BMD Semesteran	1.476.640.000		
	71	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah laporan BMD tahunan dan semesteran	1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran	300.000.000		71	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah laporan BMD tahunan dan semesteran	1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran	300.000.000		
	72	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	320.000.000		72	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	320.000.000		
<b>Jumlah : 72 sub kegiatan</b>						<b>3.457.524.120.294</b>		<b>Jumlah : 72 sub kegiatan</b>						<b>3.457.524.120.294</b>	

## **2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Berdasarkan inventarisasi usulan-usulan program/kegiatan dari masyarakat, dilakukan penyesuaian dengan nomenklatur program/kegiatan yang berlaku. Kemudian dilakukan penelitian kelengkapan informasi dari usulan, terutama mengenai jenis kegiatan, indikator kinerja, lokasi, dan besaran volume kegiatan, bila perlu dilakukan konfirmasi atau diberi catatan untuk dikonfirmasi dengan hasil analisis kebutuhan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan memeriksa apakah usulan program/kegiatan tersebut sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Rekapitulasi usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan disajikan dalam Tabel T-C.32 berikut:

**Tabel T-C.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Provinsi Sumatera Selatan**

<b>No.</b>	<b>Program/Kegiatan/Sub Kegiatan</b>		<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran/Volume</b>	<b>Catatan</b>
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>			<b>Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi</b>		
	<b>i</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah Dokumen Renja, Revisi Renstra yang disusun	2 Buku	
	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	
	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	
	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	1 dokumen	
	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	

	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Lakip yang disusun	1 buku	
	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Palembang	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	8 laporan	
	<b>ii</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Palembang	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	110 ASN	
	9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Palembang	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	5 ASN dan 85 Non ASN	
	10	Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Palembang	Jumlah jasa administrasi keuangan	3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikator	
	11	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Palembang	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terkoordinasi	10 Dokumen	
	12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Palembang	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terkoordinasi	1 Dokumen	

	13	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Palembang dan Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Tanggapan Pemeriksa dan verifikasi hibah	10 Laporan dan 17 Kab/Kota	
	14	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Palembang	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	3 Laporan	
	15	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Palembang	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Laporan	
	<b>iii</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		
	16	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Palembang	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	1 Laporan	
	17	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Palembang	Jumlah kendaraan dan deposit box yang dijamin	15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	
	18	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah laporan dan hasil penerimaan daerah dari TP-TGR	1 Laporan	
	19	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Rekonsiliasi dan Laporan BMD pada SKPD yang disusun	1 Laporan	



	20	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Palembang	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	21 Unit Kendaraan Dinas	
	<b>iv</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
	21	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Palembang	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	600 orang/stel	
	22	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Palembang	Jumlah ASN yang dihimpun analisa jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	1 Laporan	
	23	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Palembang	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (PK)	110 ASN	
	24	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Palembang dan Luar Provinsi	Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat	15 orang	
	<b>v</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	25	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	32 jenis	

	26	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Palembang	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	
	27	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Palembang	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	10 jenis peralatan rumah tangga, 18 jenis perlengkapan rumah tangga	
	28	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Palembang	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Penyediaan Makan Minum	10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	
	29	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Palembang	Jumlah Kebutuhan Barang cetakan dan Penggandaan	40 jenis yang dicetak, 45.000 counter	
	30	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Palembang	Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	7 surat kabar	
	31	Penyediaan Bahan/Material	Palembang	Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor	10 jenis ATK	
	32	Fasilitas Kunjungan Tamu		Jumlah Tamu di ruang konsultasi	10.000 tamu	
	33	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Palembang	Jumlah Kebutuhan Laporan Koordinasi dan Konsultasi	150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	
	34	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Palembang	Jumlah Keterbukaan Informasi Publik	Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	

	35	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Palembang	Jumlah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang terpelihara	7 Aplikasi	
	<b>vi</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	36	Pengadaan Mebel	Palembang	Jumlah Meubeleuir yang tersedia	Meja, kursi dan lemari	
	<b>vii</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	37	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Palembang	Jumlah surat menyurat yang dikirim	1000 surat	
	38	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Palembang	Jumlah tagihan komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	4 rekening listrik, 24 rekening telepon, 3 rekening air, 5 rekening internet	
	<b>viii</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>		

	39	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Palembang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi	21 R4, 20 R2	
	40	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Palembang	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	21 R4, 20 R2	
	41	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Palembang	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor	
	42	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Palembang	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin, venue, dan lahan/area di JSC yang terpelihara	Venue, lahan/area JSC	
	43	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Palembang	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	1 unit gedung kantor, 2 gudang arsip	
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			<b>APBD yang Tepat Waktu</b>		

	<b>i</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		
	44	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS	2 dokumen	
	45	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palembang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	2 dokumen	
	46	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Palembang	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	
	47	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Palembang	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran Perubahan APBD	100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	
	48	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Palembang	Jumlah Perda yang dihasilkan	1 Dokumen	
	<b>ii</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		

	49	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang terlaksana	17 SK	
	50	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang terlaksana	17 SK	
	51	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kab/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen	

	<b>iii</b> <b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		
52	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Palembang	Jumlah laporan rekonsiliasi pengelolaan kas daerah	12 Laporan	
53	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Palembang	Jumlah kewajiban biaya pengelolaan dan biaya provisi	SMI	
54	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Palembang	Jumlah Laporan Rekonsiliasi DAK Fisik dan Non Fisik	3 Laporan/Jenis Dana Transfer	
55	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Palembang	Jumlah laporan pelaksanaan transaksi non tunai	1 Laporan	
56	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Palembang	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	41 OPD	

	<b>iv</b>	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		
	57	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Palembang	Jumlah Laporan rekonsiliasi	2 Buku	
	58	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	
	59	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Palembang	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	1 Raperda Pertanggungjawaban	
	<b>v</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		
	60	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Palembang	Jumlah Kewajiban cicilan bunga pinjaman	SMI	



	61	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kab/Kota	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	17 Kab/Kota	
	62	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kab/Kota	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola	17 Kab/Kota	
	63	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Kab/Kota	Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi yang dikelola	17 Kab/Kota	
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>			<b>Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		
	<b>i</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		
	64	Penyusunan Standar Harga	Palembang	Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun	1 Dokumen	
	65	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	41 Laporan	
	66	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah	20 SK Gubernur Penetapan Status, 10 Berita Acara Mutasi, 5 SK Penghapusan Aset	
	67	Pengamanan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah BMD yang diamankan	41 OPD	

	68	Penilaian Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	20 Laporan Penilaian BMD	
	69	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Palembang	Persentase aset yang terinventarisasi	Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	
	70	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama	8 SK MOU (kerjasama), 1 Laporan BMD Semesteran	
	71	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah laporan BMD tahunan dan semesteran	1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran	
	72	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Palembang	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan	
<b>Jumlah : 72 sub kegiatan</b>						

Usulan program/kegiatan yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang disajikan pada tabel diatas mencakup 3 (tiga) program. Program dan kegiatan memiliki indikator kinerja, yaitu tiap program memiliki *outcome* dan kegiatan memiliki *output* yang dapat dilihat dari tabel diatas. Terlihat dengan adanya *output* yang dicapai maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan akan terwujud sehingga nantinya akan mendukung Visi Kepala Daerah lima tahun ke depan yaitu: “**Sumatera Selatan Maju Untuk Semua**”.

Usulan program tersebut yaitu:

## **1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**

Terdiri dari kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

## **2. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Terdiri dari kegiatan:

- 1) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah
- 2) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota
- 3) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah

- 4) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- 5) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

### **3. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**

Terdiri dari kegiatan:

- 1) Pengelolaan Barang Milik Daerah

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN**  
**ASET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Berdasarkan visi Kepala Daerah lima tahun ke depan yaitu: ***“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”***.

Untuk mencapai visi yang telah digambarkan di atas, maka Misi Kepala Daerah yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang didukung aparatur pemerintahan yang jujur, berintegritas, profesional, dan responsif”.

Berdasarkan visi dan misi di atas, maka tujuan dan sasaran pembangunan bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah diuraikan pada tabel 3.1 dibawah ini:

**Tabel 3.1**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022**

Tujuan		Sasaran		Indikator Sasaran		Target Kinerja Sasaran Pada Tahun				
						2018	2019	2020	2021	2022
(1)		(2)		(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1	Menciptakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang baik dan professional	1.1.1	Tercapainya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	a	Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan tepat waktu	100%				
				b	Persentase Raperda APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu	100%				
				c	Persentase Raperda Pertanggungjawaban APBD 17 Kab/Kota yang dievaluasi tepat waktu	100%				
				d	Opini laporan keuangan daerah	WTP				

				e	Persentase Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Laporan Keuangan-Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan berlaku	100%				
				f	Rasio aset yang berertifikat	100%				
				g	Persentase aset pemprov yang masuk dalam BMD	100%				
				h	Persentase realisasi penerimaan Tuntutan Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi	50%				
1.2	Meningkatkan kinerja aparatur BPKAD	1.2.1	Terpenuhinya fasilitas kerja aparatur BPKAD	a	Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran	100%				
				b	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	100%				
				c	Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi di bidangnya	100%				
				d	Tingkat disiplin aparatur BPKAD	100%				

		1.2.2	Terpenuhinya kebutuhan informasi kinerja BPKAD	a	Laporan keuangan dan kinerja yang disampaikan tepat waktu	100%				
1.1	Tata Kelola Keuangan dan Aset Daerah yang berkualitas	1.1.1	Penganggaran yang Baik	a	Penetapan APBD		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
		1.1.2	Penatausahaan Keuangan yang Baik	b	Persentase dokumen SPJ yang sesuai dengan aturan (Sisdur) dan tepat waktu		100%	100%	100%	100%
		1.1.3	Pelaporan Keuangan yang Baik	c	Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP
		1.1.4	Pengelolaan Aset Yang Baik	d	Persentase Aset tercatat dan terinventarisasi sesuai dengan aturan yang berlaku		100%	100%	100%	100%
		1.1.5	Penatausahaan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, data informasi, keuangan dan aset yang baik pada OPD BPKAD Prov. Sumsel	e	Persentase tertibnya dokumen perencanaan, pelaporan, data informasi, administrasi umum, kepegawaian, keuangan dan aset yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%



1.2	Kabupaten/Kota yang berkualitas dalam mengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.2.1	Persentase Peraturan Daerah APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota APBD/P Kabupaten/Kota yang tepat waktu	a	Persentase APBD Kab/Kota yang tepat waktu dan benar		100%	100%	100%	100%
		1.2.2	Persentase Peraturan Daerah Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota yang tepat waktu	a	Laporan Pertanggungjawaban APBD Kab/Kota yang tepat waktu		100%	100%	100%	100%

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Dalam rangka terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan menciptakan kehandalan laporan keuangan dan pengamanan aset daerah dan menciptakan pelayanan prima bidang keuangan daerah dan aset daerah melalui peningkatan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan, maka telah disusun rencana program kerja tahun 2022 sebanyak 3 (tiga) Program yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Penjabaran dari kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

##### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi**

Kegiatan:

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah.
- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang.

## **2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah**

Kegiatan:

- 9) Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah.
- 10) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota.
- 11) Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah.
- 12) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- 13) Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah.

## **3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.**

Kegiatan:

- 14) Pengelolaan Barang Milik Daerah

**Tabel 4.1**  
**Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2022**  
**Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**  
**Provinsi Sumatera Selatan**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2021			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022	
			LOKASI	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)	SUMBER DANA		TARGET PENCAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF (Rp.000)
5.02.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Tercapainya penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi		105.955.330.152				116.550.863.167
5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.423.000.000				1.565.300.000
5.02.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Renja)	Jumlah Dokumen Renja, Revisi Renstra yang disusun	Palembang	115.000.000	PAD		2 Buku	126.500.000
5.02.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Palembang	122.500.000	PAD		1 dokumen	134.750.000
5.02.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Palembang	112.500.000	PAD		1 dokumen	123.750.000
5.02.01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan DPA-SKPD	Palembang	109.000.000	PAD		1 dokumen	119.900.000
5.02.01.1.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Palembang	98.000.000	PAD		1 dokumen	107.800.000

5.02.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Lakip yang disusun	Palemba ng	486.000.000	PAD		1 buku	534.600.000
5.02.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah kinerja perangkat daerah yang dievaluasi	Palemba ng	380.000.000	PAD		8 laporan	418.000.000
<b>5.02.01.1.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>83.449.225.152</b>				<b>91.794.147.667,20</b>
5.02.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN	Palemba ng	78.245.835.152	PAD		110 ASN	86.070.418.667
5.02.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi pelaksanaan tugas ASN yang tersedia	Palemba ng	3.325.990.000	PAD		5 ASN dan 85 Non ASN	3.658.589.000
5.02.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah jasa administrasi keuangan	Palemba ng	801.400.000	PAD		3 orang bendahara, 1 orang PPK, dan 2 orang verifikator	881.540.000
5.02.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Pelaksanaan Akuntansi SKPD yang terkoordinasi	Palemba ng	135.000.000	PAD		10 Dokumen	148.500.000
5.02.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang terkoordinasi	Palemba ng	135.000.000	PAD		1 Dokumen	148.500.000
5.02.01.1.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Hasil Tanggapan Pemeriksa dan verifikasi hibah	Palemba ng dan Kab/Kot a	586.000.000	PAD		10 Laporan dan 17 Kab/Kota	644.600.000
5.02.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Palemba ng	140.000.000	PAD		3 Laporan	154.000.000
5.02.01.1.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Palemba ng	80.000.000	PAD		1 Laporan	88.000.000

<b>5.02.01.1.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>705.000.000</b>				<b>775.500.000</b>
5.02.01.1.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Palemba ng	80.000.000	PAD		1 Laporan	88.000.000
5.02.01.1.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah kendaraan dan deposit box yang dijamin	Palemba ng	215.000.000	PAD		15 Save Deposit Box, 21 Unit R4, 20 Unit R2	236.500.000
5.02.01.1.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan dan hasil penerimaan daerah dari TP-TGR	Palemba ng	250.000.000	PAD		1 Laporan	275.000.000
5.02.01.1.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi dan Laporan BMD pada SKPD yang disusun	Palemba ng	80.000.000	PAD		1 Laporan	88.000.000
5.02.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD yang disusun	Palemba ng	80.000.000	PAD		21 Unit Kendaraan Dinas	88.000.000
<b>5.02.01.1.05</b>	<b>Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>1.367.250.000</b>				<b>1.503.975.000</b>
5.02.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut dan Kelengkapannya	Palemba ng	800.000.000	PAD		600 orang/stel	880.000.000
5.02.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN yang dihimpun analisa jabatan, beban kerja dan evaluasi jabatan	Palemba ng	312.250.000	PAD		1 Laporan	343.475.000
5.02.01.1.05.05	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (PK)	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai (PK)	Palemba ng	55.000.000	PAD		110 ASN	60.500.000

5.02.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang dikirim mengikuti diklat	Palembang dan Luar Provinsi	200.000.000	PAD		15 orang	220.000.000
<b>5.02.01.1.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>8.404.535.000</b>				<b>9.244.988.500</b>
5.02.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Palembang	420.000.000	PAD		32 jenis	462.000.000
5.02.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Palembang	823.772.500	PAD		Mesin scanner, printer, komputer, laptop, alat penghancur kertas	906.149.750
5.02.01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga	Palembang	201.450.000	PAD		10 jenis peralatan rumah tangga, 18 jenis perlengkapan rumah tangga	221.595.000
5.02.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kebersihan, Bahan Pembersih dan Penyediaan Makan Minum	Palembang	384.874.500	PAD		10 jenis alat pembersih dan 50 jenis bahan pembersih	423.361.950
5.02.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Barang cetak dan Penggandaan	Palembang	1.113.000.000	PAD		40 jenis yang dicetak, 45.000 counter	1.224.300.000
5.02.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - Undangan	Palembang	52.500.000	PAD		7 surat kabar	57.750.000

5.02.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Kebutuhan alat tulis kantor	Palemba ng	1.619.538.000	PAD		10 jenis ATK	1.781.491.800
5.02.01.1.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Tamu di ruang konsultasi	Palemba ng	200.000.000	PAD		10.000 tamu	220.000.000
5.02.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Laporan Koordinasi dan Konsultasi	Palemba ng	1.450.000.000	PAD		150 kali dalam daerah, 250 kali luar daerah	1.595.000.000
5.02.01.1.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Keterbukaan Informasi Publik	Palemba ng	916.400.000	PAD		Sosialisasi PPID di Lingkungan BPKAD Prov. Sumsel	1.008.040.000
5.02.01.1.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik yang terpelihara	Palemba ng	1.223.000.000	PAD		7 Aplikasi	1.345.300.000
<b>5.02.01.1.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>400.000.000</b>				<b>440.000.000</b>
5.02.01.1.07.05	Pengadaan Meubel	Jumlah Meubeleuir yang tersedia	Palemba ng	400.000.000	PAD		Meja, kursi dan lemari	440.000.000
<b>5.02.01.1.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>1.706.250.000</b>				<b>1.876.875.000</b>
5.02.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	Jumlah surat menyurat yang dikirim	Palemba ng	26.250.000	PAD		1000 surat	28.875.000
5.02.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan komunikasi, sumberdaya air, dan listrik	Palemba ng	1.680.000.000	PAD		4 rekening listrik, 24 rekening telepon, 3 rekening air, 5 rekening internet	1.848.000.000



<b>5.02.01.1.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara</b>		<b>8.500.070.000</b>				<b>9.350.077.000</b>
5.02.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang terpenuhi	Palemba ng	840.000.000	PAD		21 R4, 20 R2	924.000.000
5.02.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang terpenuhi	Palemba ng	299.250.000	PAD		21 R4, 20 R2	329.175.000
5.02.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan Mesin Lainnya yang terpelihara	Palemba ng	955.000.000	PAD		10 jenis peralatan kantor, 10 jenis perlengkapan kantor	1.050.500.000
5.02.01.1.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin, venue, dan lahan/area di JSC yang terpelihara	Palemba ng	5.000.000.000	PAD		Venue, lahan/area JSC	5.500.000.000
5.02.01.1.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	Palemba ng	1.405.820.000	PAD		1 unit gedung kantor, 2 gudang arsip	1.546.402.000
<b>5.02.02</b>	<b>Program Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>APBD yang Tepat Waktu</b>		<b>3.341.161.189.962</b>				<b>3.675.277.308.958</b>

<b>5.02.02.1.01</b>	<b>Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Rencana Anggaran Daerah</b>		<b>4.190.000.000</b>				<b>4.609.000.000</b>
5.02.02.1.01.01	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) dan PPAS	Palembang	360.000.000	PAD		2 dokumen	396.000.000
5.02.02.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Palembang	360.000.000	PAD		2 dokumen	396.000.000
5.02.02.1.01.07	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran APBD	Palembang	1.280.000.000	PAD		100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	1.408.000.000
5.02.02.1.01.08	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Raperda dan Rapergub Penjabaran Perubahan APBD	Palembang	1.280.000.000	PAD		100 Buku Raperda, 100 buku Perda, 100 buku Rapergub, 100 buku Pergub, 500 RKA, 500 DPA	1.408.000.000
5.02.02.1.01.09	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Perda yang dihasilkan	Palembang	910.000.000	PAD		1 Dokumen	1.001.000.000
<b>5.02.02.1.02</b>	<b>Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota</b>		<b>1.290.000.000</b>				<b>1.419.000.000</b>

5.02.02.1.02.02	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD yang terlaksana	Kab/Kota	495.000.000	PAD		17 SK	544.500.000
5.02.02.1.02.03	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD yang terlaksana	Kab/Kota	495.000.000	PAD		17 SK	544.500.000
5.02.02.1.02.04	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban APBD	Kab/Kota	300.000.000	PAD		1 Dokumen	330.000.000
<b>5.02.02.1.03</b>	<b>Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah</b>		<b>5.912.187.700</b>				<b>6.503.406.470</b>
5.02.02.1.03.01	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan rekonsiliasi pengelolaan kas daerah	Palembang	545.000.000	PAD		12 Laporan	599.500.000
5.02.02.1.03.04	Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah kewajiban biaya pengelolaan dan biaya provisi	Palembang	4.326.187.700	PAD		SMI	4.758.806.470

5.02.02.1.03.05	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Laporan Rekonsiliasi DAK Fisik dan Non Fisik	Palembang	416.000.000	PAD		3 Laporan/Jenis Dana Transfer	457.600.000
5.02.02.1.03.06	Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah laporan pelaksanaan transaksi non tunai	Palembang	275.000.000	PAD		1 Laporan	302.500.000
5.02.02.1.03.09	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D	Palembang	350.000.000	PAD		41 OPD	385.000.000
5.02.02.1.04	<b>Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</b>		<b>1.479.330.000</b>				<b>1.627.263.000</b>
5.02.02.1.04.02	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan - LO, dan Beban	Jumlah Laporan rekonsiliasi	Palembang	446.200.000	PAD		2 Buku	490.820.000
5.02.02.1.04.04	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Palembang	503.600.000	PAD		1 Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi	553.960.000

5.02.02.1.04.05	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Palembang	529.530.000	PAD		1 Raperda Pertanggungjawaban	582.483.000
<b>5.02.02.1.05</b>	<b>Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>	<b>Persentase Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>		<b>3.328.289.672.262</b>				<b>3.661.118.639.488</b>
5.02.02.1.05.01	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Kewajiban cicilan bunga pinjaman	Palembang	16.500.000.000	PAD		SMI	18.150.000.000
5.02.02.1.05.02	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Palembang	1.518.139.672.262	PAD		17 Kab/Kota	1.669.953.639.488
5.02.02.1.05.03	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Dana Darurat dan Mendesak yang dikelola	Palembang	16.000.000.000	PAD		17 Kab/Kota	17.600.000.000
5.02.02.1.05.04	Pengelolaan Dana bagi Hasil Provinsi	Jumlah Dana bagi Hasil Provinsi yang dikelola	Palembang	1.777.650.000.000	PAD		17 Kab/Kota	1.955.415.000.000
<b>5.02.03</b>	<b>Program Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>10.407.600.180</b>				<b>11.448.360.198</b>
<b>5.02.03.1.01</b>	<b>Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>		<b>10.407.600.180</b>				<b>11.448.360.198</b>
5.02.03.1.01.01	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Biaya Umum yang disusun	Palembang	649.250.000	PAD		1 Dokumen	714.175.000
5.02.03.1.01.03	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	Palembang	95.000.000	PAD		41 Laporan	104.500.000

5.02.03.1.01.05	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah	Palemba ng	580.000.000	PAD		20 SK Gubernur Penetapan Status, 10 Berita Acara Mutasi, 5 SK Penghapusan Aset	638.000.000
5.02.03.1.01.07	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD yang diamankan	Palemba ng	3.825.000.000	PAD		41 OPD	4.207.500.000
5.02.03.1.01.08	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Barang Milik Daerah	Palemba ng	360.000.000	PAD		20 Laporan Penilaian BMD	396.000.000
5.02.03.1.01.09	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase aset yang terinventarisasi	Palemba ng	2.801.710.180	PAD		Sertifikat, BPKB kendaraan bermotor, Pengamanan BMD	3.081.881.198
5.02.03.1.01.10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah SK MOU (kerjasama), Perjanjian kerjasama	Palemba ng	1.476.640.000	PAD		8 SK MOU (kerjasama), 1 Laporan BMD Semesteran	1.624.304.000
5.02.03.1.01.11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan BMD tahunan dan semesteran	Palemba ng	300.000.000	PAD		1 Laporan BMD Tahunan, 1 Laporan BMD Semesteran	330.000.000
5.02.03.1.01.12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah	Palemba ng	320.000.000	PAD		1 Laporan	352.000.000
<b>Jumlah : 72 sub kegiatan</b>				<b>3.457.524.120.294</b>				<b>3.803.276.532.323</b>

## **BAB V**

### **P E N U T U P**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 yang berisikan rencana program dan kegiatan tahun 2022 serta memuat perumusan tujuan dan sasaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan merupakan upaya untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mendukung **“Sumatera Selatan Maju Untuk Semua”**.

Untuk dapat merealisasikan maksud tersebut, diperlukan adanya dukungan sumber daya aparatur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang profesional dan berdedikasi tinggi dalam melaksanakan tugasnya dan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya khususnya di Sumatera Selatan, disamping itu yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung program dan kegiatan tersebut.

Dengan mensinergikan berbagai aspek yang ada, maka diharapkan dapat menunjang dan memperkuat kemampuan badan dalam melakukan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar bisa terwujud secara maksimal selaku instansi yang mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah yang mampu menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Sumatera Selatan yang akuntabel sehingga opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat terwujud.